



Pendidikan Islam Multikultural Dalam Konteks Masyarakat Indonesia

Ali Wafa

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang; awafa9851@gmail.com

Abstrak: Tujuan reset ini memberikan pemahaman, kesadaran dan bagaimana bersedia berlaku adil tanpa melihat perbedaan dan keragaman budaya, etnis, agama, bahasa, serta aspek politik dan ekonomi. Sehingga tercipta sikap toleran terhadap perbedaan, menghargai tradisi yang hidup dalam masyarakat yang mengandung unsur kebaikan, memiliki wawasan kebangsaan dan mencintai negaranya, serta anti kekerasan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis kepustakaan yang mengkaji dari berbagai literatur baik buku, artikel jurnal, yang relevan dengan tema penelitian. Implikasi hasil penelitian: 1) mewujudkan masyarakat yang menghargai atau mengakui pluralitas dan multikulturalitas; 2) mewujudkan masyarakat yang toleran terhadap perbedaan dan keragaman budaya, etnis, agama, bahasa, serta aspek politik dan ekonomi; 3) mewujudkan nasionalisme bangsa dengan segala perbedaan dan keragamannya; dan 4) mewujudkan masyarakat yang adil dalam melayani tanpa melihat perbedaan dan keragaman.

Kata Kunci: Multikulturalisme, nilai-nilai, model-model pendidikan multikultural

Abstract: The purpose of this reset is to provide understanding, awareness and how to be willing to act fairly regardless of differences and diversity of culture, ethnicity, religion, language, as well as political and economic aspects. So as to create a tolerant attitude towards differences, respecting the traditions that live in a society that contains elements of kindness, has national insight and loves his country, and is anti-violence. This research method is qualitative with a type of literature that examines various literature including books, journal articles, and the internet that are relevant to the research theme. The implications of the research results: 1) creating a society that respects or recognizes plurality and multiculturalism; 2) creating a society that is tolerant of differences and diversity of culture, ethnicity, religion, language, as well



as political and economic aspects; 3) realizing national nationalism with all its differences and diversity; and 4) realizing a just society in service regardless of differences and diversity.

Keywords: Multicultural Education, values, multiculturalism model

Pendahuluan

Pendidikan Islam multikultural menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia, yang plural dan multikultural, karena terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Sebuah keseimbangan sangat diperlukan karena secara alamiah Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, Indonesia telah memperlihatkan keseimbangan yang patut menjadi teladan. Meski Islam adalah agama mayoritas, namun negara telah secara seimbang memfasilitasi kepentingan umat agama lain.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses penanaman dan transfer nilai-nilai. Di antara nilai yang dapat ditanamkan melalui pendidikan untuk masyarakat majemuk adalah nilai kebangsaan, nilai kemanusiaan, nilai kebudayaan, dan nilai keagamaan. Dalam kerangka ini, pendidikan nasional meletakkan salah satu prinsipnya: "bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari semboyan yang sangat adil dan demokratis: "Bhinneka Tunggal Ika". Semboyan ini memiliki pengertian bahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang terdiri dari beragam suku dan ras, yang mempunyai budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda tetapi dalam kesatuan Indonesia. Semboyan ini mengandung seni manajemen untuk mengatur keragaman Indonesia, yang terdiri dari 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal, 13.000 pulau, 6 agama resmi, dan latar belakang kesukuan yang sangat beragam (Abdullah Aly, 2015).

Selain itu, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat juga dari kondisi geografis dan sosio-kultural bangsa Indonesia yang beragam, kompleks, dan luas serta dari dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal dapat dilihat dari perbedaan etnis, agama, makanan, pakaian, bahasa daerah dan budaya. Sementara dimensi vertikal, kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat sosial budaya, ekonomi dan pendidikan (Penyusun, 2019).

Sebagai masyarakat majemuk dan multikultural, Indonesia memiliki isu-isu sensitif, seperti isu agama, isu minoritas seperti Ahmadiyah, Syi'ah, dan aliran kepercayaan lainnya. Tidak kalah sensitifnya adalah hubungan antara etnis non Tionghoa dengan Tionghoa atau sebaliknya, juga antar suku Dayak, Melayu, dan Madura. Selain itu, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah para penganut agama yang taat, maka faktor pemahaman agama juga menentukan integrasi dan disintegrasi sosial. Pemahaman agama yang dianut bersifat pluralis, akan menciptakan integrasi sosial. Sebaliknya, pemahaman agama yang eksklusif, akan memecahbelah dan menciptakan pertentangan (Osman, 2012). Masing-masing suku tersebut memiliki bahasa, adat dan tradisi yang berbeda-beda. Dari sisi agama,



suku Jawa, Sunda, dan Madura identik dengan Islam. Bali identik dengan Hindu-Budha, dan Dayak, Manado, Kepulauan Maluku, Irian Jaya identik dengan Kristen. Bahkan 85% masyarakat Indonesia beragama Islam, 10% umat Kristiani, dan Hindu-Budha sekitar 1,5% (Syam, 2013).

Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki angka keragaman tertinggi di dunia, baik dari sisi agama maupun budaya. Jumlah pulaunya lebih dari 17.000. Ada ratusan bahasa, budaya, dan agama. Sejarah Indonesia sesungguhnya sangat kaya terkait dengan pengelolaan keragaman (Wahab, 2015). Oleh karena itu, keragaman tersebut perlu dikelola dengan baik melalui alternatif penanaman nilai-nilai pendidikan Islam multikultural sebagai opsi penanggulangan timbulnya berbagai konflik yang disebabkan oleh keragaman. Penanaman nilai-nilai multikultural tentu harus didukung kebijakan pemerintah, tanpa kebijakan tersebut pendidikan multikultural sebagai opsi penanggulangan konflik akan sulit.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam artikel ini ada dua, yaitu: sumber data primer berupa buku, seperti yang ditulis Abdullah Aly, berdasarkan hasil Penelitian desertasinya dengan judul "Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, 2011. *Kedua*, KH. Muhammad Tholchah Hasan, dengan judul Pendidikan Multikultural: Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme, 2016. *Ketiga* buku Zakiyuddin Baidhaway "Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, 2005". *Keempat*, Choirul Mahfud dengan judul "Pendidikan Multikultural, 2021"; dan *kelima*, buku H.A.R. Tilaar "Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, 2004".

Di samping beberapa buku ini, sumber primer yang digunakan adalah artikel jurnal yang relevan, seperti hasil Penelitian Dede Rosyada, 2014 dengan judul "Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*". Termasuk artikel yang ditulis Parsudi Suparlan, 2002, yang berjudul "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Antropologi Indoensia*, 69" dan lain-lain yang relevan (Sugiyono, 2017). Kemudian, dari beberapa sumber data primer dan sekunder tersebut digunakan analisis kontens isi, dibandingkan dengan teori dan realitas kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan, yakni kebudayaan dilihat dari perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Karena itu, melihat kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia (Suparlan, 2002). Secara etimologis multikulturalisme terdiri dari kata "multi" yang berarti plural atau berjenis-jenis dan "kulturalisme" berarti kultur atau budaya. Plural bukan sekedar pengakuan terhadap keragaman dan perbedaan, tetapi juga pengakuan tersebut yang mempunyai implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Pluralisme berakaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak hidup kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas atau negara yang mempunyai budaya masing-masing. Paling tidak, ada dua ciri utama dalam multikulturalisme, yaitu: kebutuhan pengakuan (*the need*



of recognition), dan legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya (Tilaar, 2004).

Pendidikan multikultural berakar pada pengakuan hak asasi manusia. Dalam artian pendidikan multikultural berorientasi pada humanisme, yaitu kasih sayang dan toleransi tanpa melihat perbedaan warna kulit, perbedaan agama dan keyakinan serta perbedaan kelas sosial. Tanpa kasih sayang dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut tidak mungkin dibangun bangsa yang kuat. Di dalam keragaman suatu masyarakat tersimpan kekuatan. Toleransi terhadap perbedaan yang ada di dalam masyarakat merupakan pengakuan terhadap kekuatan-kekuatan yang tersembunyi di dalam kelompok masyarakat yang plural (Tilaar, 2004:260).

Selanjutnya, Fay (1996), Jary dan Jary (1991), dan Watson (2000) multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan dan kelompok (Suparlan, 2002). Yang dimaksud perbedaan adalah perbedaan individual maupun perbedaan budaya. Perbedaan budaya mendorong upaya terwujudnya keragaman budaya sebagai sebuah corak kehidupan masyarakat yang mempunyai keragaman kebudayaan, yaitu: yang saling memahami dan menghormati kebudayaan mereka yang berbeda satu dengan lainnya, termasuk kebudayaan kelompok minoritas (Parsudi, 2002).

Sementara, gagasan tentang pendidikan multikultural di Indonesia sendiri banyak perspektif, sebagaimana dijelaskan (Tilaar, 2004) yaitu: pendidikan yang mengajarkan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat masing-masing etnik tersebut. Dalam hal ini, peran kurikulum menjadi poin penting dalam menumbuhkan sikap toleran masyarakat dalam rangka mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan dan keragaman, khususnya dalam mengurangi prasangka negatif pada kelompok etnik lain yang berbeda (Tilaar, 2004).

Pendidikan multikultural adalah pengajaran menempatkan nilai-nilai multikulturalisme sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yaitu: inklusif, egaliter, demokratis, dan humanis, namun tetap kokoh pada nilai-nilai spiritual dan keyakinan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Lebih lanjut dijelaskan, pendidikan multikultural tidak harus melaksanakan pendidikan yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, maupun agama. Tetapi bagaimana memberikan pemahaman dan kesadaran untuk berlaku adil kepada peserta didik tanpa melihat perbedaan suku, etnis, ras, budaya, agama, dan bahasa. Sehingga tercipta hidup bersama, saling menghormati, bekerja sama, tolong-menolong, gotong-royong dalam suasana hidup rukun dan damai dalam keragaman (Hasan, 2016).

Sleeter dan Grant dalam (Rosyada, 2014) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki empat makna, yakni: 1) pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural; 2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial; 3) pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat; dan 4) pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan.

Sementara (Baidhawiy, 2005) memiliki perspektif sendiri tentang pendidikan

multikultural, yaitu: pendidikan yang menanamkan empat pilar kesadaran; 1) pentingnya hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan agama-agama; 2) menyemangati relasi antar manusia dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami, dan menghargai persamaan perbedaan dan keunikan; 3) independensi dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan perspektif agama-agama dalam satu dan lain masalah dengan pikiran terbuka; dan 4) sutau kreasi untuk menemukan jalan terbaik mengatasi konflik antaragama dan menciptakan perdamaian melalui sarana pengampunan dan tindakan anti kekerasan.

Realitas Masyarakat Multikultural di Indonesia

Secara historis, munculnya masyarakat multikultural bukan hasil kebudayaan dan bukan pula karena faktor lain, melainkan sebuah realitas yang merupakan anugerah Tuhan. Multikulturalisme merupakan pemberian, takdir Tuhan bukan faktor bentukan manusia. Bahkan, masyarakat sudah memahami bahwa setiap manusia terlahir berbeda-beda, baik fisik maupun non fisik, namun nalar kolektif masyarakat belum bisa menerima realitas setiap individu tau kelompok tertentu memiliki sistem keyakinan, budaya, adat, agama, dan tata acara ritual yang berbeda. Dalam menghadapi realitas multikultural tersebut masyarakat Indonesia cukup beragam: dengan prasangka negatif, kecurigaan dan bahkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda dengan dirinya. Tetapi sebagian lain menghadapi dengan penuh prasangka baik sebagai sebuah anugerah Tuhan (Mahfud, 2021).

Bahkan (Osman, 2012) menegaskan, sebelum ilmuwan berbicara tentang munculnya multikultural, al-Qur'an jauh sebelum itu sudah membicarkannya. Dalam pandangan Islam pembagian menjadi orang-orang dan kelompok lain yang memiliki asal yang sama diakui di dalam al-Qur'an (QS. 49:13). Allah menciptakan seluruh umat manusia dari jiwa yang satu. Tapi dalam waktu bersamaan, Allah menghendaki manusia menjadi kaum dan golongan yang berbeda-beda dalam aspek rupa, warna kulit, bahasa dan postur tubuh. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat, 30, ayat 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفُ اللَّسَانَاتِ وَاللَّوْنَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ [الروم: ٢٢]

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Perbedaan harus dijadikan sarana untuk saling mengenal, menyayangi, dan bekerjasama, dan bukan saling bertikai. Islam menghargai perbedaan melalui konsep *syu'ban wa qabailan*, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, namun hakikatnya adalah memiliki kesamaan dalam *hablum nin al-nas*, atau tali persambungan kemanusiaan. Etnis yang satu tidak lebih baik dari lainnya, sebab ukurannya bukan warna kulit, bahasa, dan budayanya, tetapi nilai ketakwaan terhadap Tuhan (Syam, 2013). Dalam ayat lain Allah juga menegaskan seperti dalam surat Hujurat, 49 ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الْحُجُرَات: ١٣]

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pengembangan masyarakat multikultural sudah dilakukan oleh rasulullah Muhammad Saw ketika ia membangun kota Madinah. Jika melihat sejarah, masyarakat Madinah ketika itu dapat dikatakan sebagai masyarakat yang plural dan multikulturalisme, yang terdiri dari Yahudi, Arab yang masih menganut agama nenek moyang, Muhajirin dan Anshor. Maka agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, rasulullah mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka, yang dikenal dengan "Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah". Piagam ini menjamin kebebasan beragama, sosial dan politik (Yatim, 2018).

Salah satu bukti pengembangan tersebut dengan adanya Piagam Madinah, yang memuat minimal empat hal, yaitu: 1) mempersatukan segenap kaum muslimin dari berbagai suku menjadi suatu ikatan; 2) menghidupkan semangat gotong royong, hidup berdampingan, saling menjamin keamanan di antara sesama warga negara; 3) menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata; dan 4) menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan bersama. Mengingkari Pluralisme tersebut pada hakikatnya mengingkari sunnatullah yang memang Allah ciptakan manusia dalam kategori bersuku, beretnis atau berbangsa yang berbeda-beda (Syam, 2013) sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas.

Dalam konteks bangsa Indonesia, sebagaimana dijelaskan Priyo Baliyono (2013) dalam (Hasan, 2016) menyebutkan minimal empat faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi masyarakat multikultural dan multiras; faktor sejarah Indonesia, geografis, bentuk fisik Indonesia, dan struktur geologi.

Pertama, faktor sejarah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negeri yang kaya dan subur. Semua diperlukan bangsa lain tumbuh di Indonesia. Karena itu, tidak heran jika Indonesia menjadi negeri incaran bagi bangsa lain. Sejak tahun 1605 M negara Indonesia telah dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Cina, Belanda dan Jepang. Bahkan jauh sebelum itu, pedagang Arab telah datang ke Indonesia diperkirakan abad ke-7/8 M. oleh karena itu, mereka tinggal dan menetap dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini menjadi Indonesia memiliki struktur ras, dan budaya yang makin beragam.

Kedua, faktor geografis. Jika dilihat secara geografis Indonesia berada di jalur persimpangan transportasi laut yang ramai dan strategis. Karen itu, banyak bangsa-bangsa atau para pedagang luar singgah ke Indonesia sekedar untuk berdagang, serti pedagang Arab, India, Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang dan Cina. Pedagang Arab diperkirakan datang ke Indonesia sejak abad ke-7/8 M. Semua bangsa tersebut memiliki struktur budaya dan agama yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan masuknya unsur-unsur budaya baru ke Indonesia.



Ketiga, faktor bentuk fisik Indonesia. Jika dilihat dari struktur geologinya, bangsa Indonesia terletak dipertemuan tiga lempeng benua besar. Hal ini menjadikan Indonesia berbentuk negeri kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Masing-masing pulau memiliki karakteristik fisik sendiri-sendiri. Untuk mempertahankan hidup, masyarakat di masing-masing pulau mempunyai cara yang berbeda-beda pula sesuai dengan kondisi fisik daerahnya. Oleh karena itu, masing-masing pulau juga mempunyai perkembangan yang berbeda-beda pula, seperti teknologi, budaya, seni, dan bahasa, sehingga akhirnya membentuk masyarakat multikultural.

Keempat, faktor perbedaan struktur geologi. Indonesia terletak di antara tiga pertemuan lempeng, yaitu lempeng Asia, Australia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan Indonesia mempunyai tiga tipe struktur geologi, yaitu tipe Asia dengan struktur geologi Indonesia Barat, tipe peralihan dengan struktur geologi Indonesia Tengah, dan tipe Australia dengan struktur geologi Indonesia Timur. Perbedaan inilah yang mengakibatkan adanya perbedaan ras, suku, etnis, jenis flora, dan faunanya.

Kelima, faktor imigran, adanya imigrasi penduduk dari satu daerah ke Indonesia dalam jangka waktu yang lama dari tahun ke tahun. Perpindahan penduduk ke negara lain tentu ada motif tertentu, seperti motif ekonomi dan lain sebagainya (Tilaar, 2004). Jika melihat sejarah, sejak abad ke-4 M, seperti penganut agama Hindu-Budha sudah datang ke Indonesia, termasuk bangsa Arab pada abad ke-7 M dengan motif ekonomi dan dakwah Islam. Disusul pada ke-14 M banyak bangsa-bangsa Eropa juga datang ke Indonesia dengan ekonomi, agama, politik atau kekuasaan. Mereka membawa kebudayaan dan bahkan membentuk kelompok masing-masing sesuai suku, ras, etnis, agama dan budaya.

Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural dalam konteks Indonesia

Nilai-nilai pendidikan Islam multikultural yang harus ditanamkan di tengah perbedaan dan keragaman suku, ras, etnis, budaya, bahasa, maupun agama bagi masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Beberapa nilai ini merupakan aplikasi dari nilai-nilai ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-hadits. Dalam hal ini terdapat beberapa perspektif di antara para ahli sebagaimana dijelaskan oleh (Hasan, 2016) tentang nilai-nilai pendidikan multikultural, yaitu inklusif, egaliter, demokratis, dan humanis. Kemudian, tentang nilai-nilai inklusif dalam mengembangkan kehidupan masyarakat multikultural (Hasan, 2016) membagi menjadi: *tasamuh* (toleransi), *tawassuth* (moderat), *ta'awun* (saling menolong), dan *tawazun* (harmoni). Namun, sebenarnya beberapa nilai tersebut merupakan sebuah tawaran atau manajemen untuk mengurangi dan bahkan mencegah timbulnya konflik yang disebabkan oleh perbedaan dan keragaman.

Nilai-nilai inklusif dalam mengembangkan kehidupan masyarakat multikultural yang dikembangkan oleh (Hasan, 2016) yaitu: *pertama*, *tasamuh* (toleransi) menjadi salah satu sikap dasar dan karakter ajaran Islam, sehingga Islam disebut sebagai agama "kasih sayang" dengan prinsip *Islam rahmatan lil'alamin*. Prinsip atau dasar hubungan orang Islam dengan non muslim sudah disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an, salah satu dalam al-Qur'an surat al-Imron ayat 159.



Kedua, tawassuth (moderat) menjadi identitas umat Islam seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143. Agama Islam membutuhkan pendekatan *tawassuth* dalam berbagai hal, sesuai dengan prinsip kemudahan dan menghindari kesulitan. Islam harus menjaga kesiapannya untuk dapat hidup Bersama dengan berbagai macam bangsa dan umat yang berbeda-beda, dapat menampung beberapa aktivitas individu maupun kelompok, Lembaga maupun negara.

Ketiga, ta'awun (tolong menolong), merupakan salah satu karakter sosial yang terpuji secara universal, bangsa manapun mengakuinya sebagai sikap yang baik, demikian juga agama apapun menilainya sebagai amal perbuatan yang terpuji. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2. *Keempat, tawazun* (harmoni) merupakan sikap dan orientasi hidup yang diajarkan Islam, sehingga manusia tidak terjebak dalam ekstremitas dalam hidupnya, tidak semata-mata mengejar kehidupan ukhrawi dengan mengabaikan kehidupan duniawi. Dalam konteks kehidupan multikultural, sikap harmoni harus dijunjung tinggi agar tercipta kehidupan yang damai (Hasan, 2016).

Sementara, (Tilaar, 2004) nilai-nilai pendidikan multikultural yang dikembangkan oleh untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai dan toleran di dalam keragaman, yaitu: *Pertama*, nilai demokrasi: pengakuan terhadap hak asasi manusia tanpa membedakan perbedaan-perbedaan manusia atas warna kulit, agama, dan gender. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan dengan martabat yang sama tanpa membedakan akan warna kulit, asal-usul, agama, dan jenis kelamin Nilai demokrasi juga melahirkan pengenalan dan pengakuan terhadap budaya yang berjenis-jenis, termasuk mengakui hak asasi manusia di dalam kehidupan berbudaya (Tilaar, 2004). Sementara menurut (Rosyada, 2014). nilai demokrasi menjadi ruh kehidupan masyarakat dalam membangun persatuan dan kesatuan, membangun kekuatan dalam kemajemukan, serta menghilangkan sekat-sekat kultur, ras, bahasa dan agama demi kepentingan bangsa ke depan, yang dituntut untuk semakin kompetitif dalam menghadapi persaingan global.

Kedua, menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), HAM bukan hanya dalam aspek politik, tetapi juga hak-hak ekonomi dan kebudayaan. Dalam artian, HAM untuk menghilangkan diskriminasi politik, ekonomi dan kebudayaan. Prinsip kesetaraan bukan hanya mengakui hak asasi secara individual, melainkan juga hak kelompok, kelompok mensuku, kelompok bangsa berdasarkan kebudayaannya dan kelompok antaragama (Tilaar, 2004:216).

Ketiga, toleransi: sikap menerima terhadap keragaman tanpa diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang berbeda, khususnya menyangkut warna kulit, agama, dan gender. Tanpa toleransi terhadap perbedaan sulit dibangun suatu bangsa yang kuat. Toleransi dalam perbedaan yang hidup dalam suatu masyarakat berarti mengakui terhadap kekuatan-kekuatan yang tersembunyi di dalam kelompok-kelompok masyarakat yang plural. Perbedaan suku, perbedaan adat-istiadat, budaya, perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang untuk hidup bersama sebagaimana dicita-citakan di dalam proklamasi kemerdekaan. Perbedaan justru mengajarkan kita untuk membentuk suatu persatuan yang kuat.

Keempat, humanisme: rasa kasih sayang antar sesama dan toleransi di dalam keragaman dan perbedaan, seperti perbedaan warna kulit, perbedaan agama dan



keyakinan serta perbedaan kelas sosial. Tanpa rasa kasih dan toleransi di dalam perbedaan-perbedaan tersebut tidak mungkin dibangun suatu bangsa yang kuat. Perbedaan merupakan kekuatan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, yang apa bila dikelola dengan baik akan tercipta kehidupan yang penuh kasih dan penuh toleransi sehingga kekuatan tersebut menjadi perekat yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat yang multikultural (Tilaar, 2004:260). *Kelima*, inklusivisme: sikap terbuka penuh toleransi dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sikap inklusif menumbuhkan kesadaran akan realitas kehidupan bangsa Indonesia yang plural dan multikultural (Tilaar, 2004:264).

Keenam, solidaritas sosial, yaitu rasa keterikatan kepada kelompok masyarakat berdasarkan kebangsaan, bukan berdasarkan strata sosial, perbedaan suku, ras, etnis, budaya, maupun agama (Tilaar, 2004:120). Menurut (Mahfud, 2021:12) rasa solidaritas adalah pergumulan yang menginginkan terciptanya pengakuan perbedaan atas yang lain tanpa merendahnya. Semangat solidaritas ini menuntut eliminasi penguatan identitas kelompok sebagai superior dengan mengurangi jarak social. *Ketujuh*, nasionalisme, merupakan pengakuan akan rasa kebangsaan yang kuat serta keadilan sosial bagi semua kelompok masyarakat, tanpa memandang kelompok apapun, termasuk pengakuan terhadap hak-hak kelompok masyarakat minoritas (Tilaar, 2004:121).

Model Pendidikan Islam Multikultural dalam konteks Indonesia

Model-model dalam mengembangkan sikap terhadap realitas perbedaan dan keragaman suku, ras, jender, agama, pemikiran dan ideologi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat hidup damai yaitu: *Pertama*, model *uniformity*, yaitu menekankan persamaan-persamaan esensial bagi semua warga negara dan menyingkirkan perbedaan-perbedaan. Karena perbedaan menjadi penyebab perpecahan masyarakat yang beragam (Schlesinger, 1997; Hirsch, 1994). Teori ini berangkat dari pandangan seandainya semua warga memiliki keyakinan, cara pandang, dan bahasa yang sama, maka masyarakat akan damai dan adil.

Kedua, model *diversity recognition*, yakni menekankan untuk menghargai dan mengakui perbedaan dan keragaman individual maupun kelompok dan menolak penekanan kepada keseragaman. Dengan kata lain, model *diversity recognition* ini memberikan kebebasan individu dan kelompok untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai utamanya, termasuk nilai-nilai non liberal. Menurut teori ini, masing-masing harus memperoleh pengakuan (*recognition*) setara. Pengakuan setara kepada masing-masing, membuat mereka diperlakukan secara adil dan perlakuan adil. Indonesia mengikuti model ini, namun masih diskriminatif dan lebih menguntungkan kelompok-kelompok yang kuat secara ekonomi dan politik.

Ketiga, model dialog dan interaksi multikultural (*dialogue atau equity*), yang menekankan pentingnya masing-masing kelompok untuk menjalin kontak, komunikasi, dialog dan interaksi saling memahami budaya masing-masing, dan mengurangi prasangka antar kelompok (Allport, 1979). Dengan model ini masing-masing kelompok akan lebih mengenal identitas dirinya dalam perbandingan dengan yang lain, masing-masing akan memiliki simpati dan empati terhadap nilai



dan kelompok lain, memiliki wawasan yang lebih luas dalam mencapai titik temu dan menyadari kepentingan dan jalan bersama.

Keempat, model keadilan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua kelompok masyarakat multikultural. Menurut teori ini dialog multikultural harus dilakukan. Tetapi, dialog multikultural semata tidak memadai karena konflik ras, etnis dan sosial bukan hanya karena ketidakpahaman tentang nilai, tradisi, atau keyakinan kelompok lain (*multicultural literacy*), melainkan karena diskriminasi dan ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik (Banks, 1997&2001; Grant; Ogbu, 2001; Sleeter & McLaren, 1995). Menghilangkan diskriminasi dan membangun masyarakat yang adil secara ekonomi dan politik merupakan basis integrasi masyarakat multikultural. Lebih lanjut Osman, penekanan kepada keadilan sangat sentral dalam Islam. Ia meyakini bahwa saling pengertian dan keadilan inilah yang menciptakan perdamaian.

Kelima, model pluralisme, yang menekankan saling pengertian, dialog, interaksi, dan kerjasama sesuai konsep al-Qur'an "*li ta'arafu*". Fathi Osman, meyakini bahwa Nabi Muhammad bukan hanya mengakui kebebasan dan kemajemukan, melainkan juga berdialog, berinteraksi dan membangun kerjasama dalam kemajemukan termasuk dengan kaum Yahudi sebagaimana dalam Piagam Madinah.

Kesimpulan

Pendidikan Islam multikultural merupakan upaya secara kontinyu untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Islami yang memiliki kapasitas, profesionalitas, dan spiritualitas yang baik dalam kerangka meningkatkan kompetensi bangsa dengan pemahaman, sikap dan perilaku yang mengedepankan kerukunan dan toleran. Indikator pendidikan Islam multikultural adalah adanya pemahaman, sikap dan perilaku yang mengedepankan kerukunan di dalam masyarakat, toleran terhadap perbedaan, menghargai tradisi yang hidup dalam masyarakat yang mengandung unsur kebaikan, memiliki wawasan kebangsaan dan mencintai negaranya, serta anti kekerasan.

Pendidikan multikultural bukan satu-satunya solusi dalam mencegah timbulnya beberapa konflik yang disebabkan oleh perbedaan dan keragaman, melainkan sebuah tawaran solusi untuk menanamkan pemahaman, kesadaran kolektif terhadap pluralitas dan multikulturalitas bangsa. Selain itu, pendidikan multikultural disebut sebagai manajemen konflik dalam keragaman. Namun kedua konsep ini tidak akan berjalan sesuai harapan bersama secara kolektif tanpa didukung oleh kebijakan pemerintah.

Salah satu tawaran pendidikan multikultural dalam mengurangi atau memanaje konflik perbedaan tersebut dengan cara menanamkan beberapa karakter atau nilai kepada peserta didik sebagai bangsa, yaitu: inklusif, egaliter, demokratis, dan humanis. Nilai-nilai inklusif yang dimaksud adalah *tasamuh* (toleransi), *tawassuth* (moderat), *ta'awun* (saling menolong), dan *tawazun* (harmoni). Selain beberapa nilai ini, juga menawarkan beberapa model pendidikan yang harus ditanamkan kepada peserta didik sebagai dari masyarakat.

**Daftar Pustaka**

- Abdullah Aly. (2015). Studi Deskriptif Tentang Nilai-Nilai Multikultural Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam. *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 1(1), 9-24.
<http://jurnal.assalaam.or.id/index.php/dfg/article/view/25/17>
- Baidhawiy, Zakiyuddin. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, Muhammad Tholchah. (2016). *Pendidikan Multikultural: Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme* (Abdul Wahid (ed.); Ketiga). Malang: Universitas Islam Malang.
- Mahfud, Choirul. (2021). *Pendidikan Multikultural (IX)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Osman, Mohamed Fathi. (2012). *Islam, Pluralisme & Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban*. Jakarta: Democracy Project.
- Penyusun, Tim Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Rosyada, Dede. (2014). Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konseptual. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1).
<https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1200>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (26th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. (2002). 22069-41363-1-SM. *Jurnal Ketahanan Nasional*, VI (1).
- Suparlan, Parsudi. (2002). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Antropologi Indoensia*, 69.
- Syam, Nur. (2013). *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan* (5th ed.). Yogyakarta: KANISIUS.
- Tilaar, H. A.R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wahab, Abdul Jamil. (2015). *Harmoni di negeri seribu agama : membumikan teologi dan fikih kerukunan*. 15(1), 174.
- Yatim, Badri. (2018). *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, Cetakan ke-29*. Depok: Rajawali Pers.